



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
**UNIT KERJA** : STAF AHLI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RATIH MAYANGSARI  
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEMARITIMAN, PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN  
3. NHK : 415705

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 15.130.690.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 537 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA  
JAKARTA UTARA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 13.831.059.000  
2. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m2/45 m2 di KAB / KOTA  
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 264.352.000  
3. Tanah Seluas 1.584 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI  
Rp. 624.096.000  
4. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI  
Rp. 227.500.000  
5. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA  
BEKASI , HIBAH TANPA AKTA Rp. 183.683.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 273.400.000

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.  
270.000.000  
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI  
Rp. 3.400.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 840.140.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. 426.278.650

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.331.737.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----



Sub Total	Rp.	19.002.245.650
III. HUTANG	Rp.	7.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	18.995.245.650

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.